



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu



POSITIF

KATEGORI BERITA:



NETRAL



NEGATIF

Kejari Terus Lakukan Pemanggilan Saksi

BINTUHAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur hingga saat masih menunggu hasil penghitungan ulang kerugian negara (KN) dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur tahun 2023. Sembari menunggu hasil tersebut, Kejari Kaur masih terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang mengetahui tentang aliran anggaran perjalanan dinas fiktif di tahun 2023 tersebut.

Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH, mengatakan, sekarang sudah ada sekitar 23 orang lebih saksi yang telah dipanggil. Sebelum naik ke tahapan ini, dalam perkara ini tim penyidik Kejari Kaur telah melakukan pemanggilan terhadap 20 orang pegawai Setwan Kaur.

"Sekarang masih menunggu tahapan penghitungan kerugian negara ulang. Serta terus melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk memperkuat alat dan bukti," ucapnya.

Tim penyidik juga masih terus mempelajari bundel-bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalan Dinas yang sebelumnya telah diamankan pada saat pengeledahan Beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan saat ini, masih tetap disimpulkan kalau para pemangku jabatan di DPRD Kaur membuat SPJ Perjalananan Dinas fiktif yang mengatasnamakan tenaga honorer padahal orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas sehingga dari kejadian ini terdapatlah kerugian negara.

"Pemeriksaan berkas juga terus dilakukan, modus dari kejadian ini adalah perjalanan dinas fiktif," ungkap Bobbi.

Sementara itu, Bobbi mengungkapkan setelah hasil penghitungan ulang KN ini nanti kemungkinan besar Kejari Kaur bakal melakukan proses penetapan tersangka. Mengingat sekarang mereka memang telah mengantongi beberapa nama, yang bertanggungjawab atas kegiatan yang menyebabkan kerugian negara tersebut.

"Mungkin setelah penghitungan KN, penetapan tersangka. Kalau nama-nama yang bertanggungjawab dalam anggaran ini, pasti sudah kita kantong," tegas Bobbi.

Ditambahkannya, dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun lalu ditemukan KN sebanyak Rp11 miliar di Setwan Kaur dari

anggaran perjalanan dinas. Namun hasil tersebut tidak bisa dijadikan dasar penghitungan oleh Kejari, sehingga penghitungan ulang harus dilakukan bisa saja KN yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum ini lebih dari itu.

"Kalau untuk penghitungan dari BPK kita telah dapat, namun itu tidak bisa dijadikan landasan," ungkap Bobbi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur. Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan pengeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan. (cil)